

STATUS PENYELIDIKAN KPK

-  Tahapan saat ini:
Penyelidikan, segera naik ke Penyidikan
-  Fokus:
Dugaan korupsi kuota haji khusus tambahan
-  Jumlah kuota yang disorot:
20.000 jemaah (tambahan dari Arab Saudi)
-  Kuota dibagi:
10.000 reguler & 10.000 haji khusus
-  Potensi pelanggaran:
Jual-beli kuota, alihfungsi kuota, penyalahgunaan wewenang

MASALAH UTAMA YANG DIDUGA

-  Kuota haji diperdagangkan secara ilegal melalui biro tertentu
-  Nilai ekonomi kuota sangat besar, melibatkan praktik rente
-  Ketidaksinkronan regulasi, membuka celah manipulasi sistem
-  Lemahnya pengawasan internal Kemenag & pengabaian UU

Langkah KPK Selanjutnya

-  Akan menentukan siapa yang layak ditetapkan sebagai tersangka
-  Peluang pemanggilan mantan Menag Yaqut terbuka
-  Identifikasi alur pengelolaan kuota tambahan
-  Terus periksa saksi & korban

KASUS KUOTA HAJI, SIAPA TERSANGKA?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggulirkan kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji khusus. Penanganan kasus yang terjadi pada era menteri agama (menag) Yaqut Cholil Qoumas ini kerap menjadi pertanyaan Masyarakat. Betapa tidak, kasus ini sempat menghebohkan publik karena menyentuh isu yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia, yaitu ibadah haji. Ya, ibadah haji adalah impian banyak umat Islam di Indonesia, dan sistem kuota yang terbatas seringkali membuat antrean keberangkatan sangat Panjang, bahkan di Jawa Timur antreannya hingga 36 tahun. Selain itu, kasus ini juga menjadi cerminan betapa krusialnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ibadah haji di Indonesia, mengingat tingginya harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses keberangkatan ke Tanah Suci. Bahkan, jika benar terjadi praktik jual beli kuota atau pengalihan kuota yang tidak sesuai prosedur, maka hal ini menciptakan ketidakadilan bagi calon jemaah haji yang sudah mengantre bertahun-tahun secara sah. Mereka yang memiliki koneksi atau uang lebih bisa saja memotong antrean, sementara masyarakat kecil semakin sulit untuk berangkat. Nah, untuk menjawab ke Gundahan tersebut, KPK menunjukkan progress terbaru dari penanganannya. KPK pun menyebut akan segera menaikkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Jika memang demikian, yang menjadi pertanyaan siapakah yang akan mengemban status tersangka? Akankah Yaqut Cholil Qoumas?

BACA HAL 11...



Kemensos Evaluasi 603.999 Penerima Bansos Terindikasi Main Judol

Sebanyak 27,5 persen dari total 1.091 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami kerugian. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dari jumlah BUMD tersebut, 678 BUMD memperoleh laba, 300 BUMD rugi, dan 113 BUMD lainnya belum melaporkan data yang terakhir. Ironisnya penyebab kerugian karena keberadaan orang dalam (ordal) Kepala Daerah.

Sebanyak 603.999 penerima bantuan sosial (Bansos) terancam tidak akan menerima lagi. Sebab, Kementerian Sosial (Kemensos) sedang mengevaluasi sebanyak 603.999 penerima bansos yang menurut catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terlibat dalam aktivitas judi online (Judol).

"Dari sejumlah 603.999 yang terindikasi terlibat judi online, ada 228.048 KPM saat ini sudah tidak menerima bansos pada triwulan ke-2, sementara yang 375.951 KPM kita sedang lakukan evaluasi untuk bansos triwulan ke-3," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta, Sabtu (19/7/2025).

Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan bahwa temuan penerima bansos yang diduga terlibat judol ini bermula dari pengiriman data dari Kemensos ke PPATK untuk mengecek ulang penerima bansos agar tepat sasaran. Selanjutnya, PPATK melakukan pengecekan terhadap 32.055.168 KPM yang pernah atau sedang menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako. Hasilnya, lanjut Gus Ipul, ternyata sangat mengejutkan.

"PPATK telah mengirimkan balik hasil pemadanan data KPM bansos dengan yang terindikasi terlibat judi online sejumlah 656.543 KPM," urainya.

Kemudian dari data yang menyebutkan 656.543 KPM tersebut, lanjut Gus Ipul, kemudian NIK KPM dipadankan ke DTSEN. Nah,

darisinih kemudian tersaring dan menyebutkan bahwa KPM yang terindikasi judi online sebanyak 603.999.

"Terhadap data tersebut, Kemensos telah memberikan tanda pada DTSEN dengan status terindikasi terlibat judi online," terangnya.

"Sementara transaksi tertingginya (rekening terindikasi judol) adalah Rp3 miliar lebih. Transaksi terendahnya Rp1.000. Rata-rata deposit kalau dirata-ratakan adalah Rp2 juta lebih," kata dia.

Gus Ipul mengatakan Kemensos dan PPATK masih akan menganalisis, mengidentifikasi, dan segera melaporkan perkembangan kasus ini ke publik.

"Saat kita akan koordinasi dengan PPATK dan menyerahkan seluruh NIK yang pernah dan sedang menerima bansos dari Kemensos, tentu kami izin terlebih dulu ke Bapak Presiden. Ini dalam rangka bansos tepat sasaran berdasarkan Inpres 4 Tahun 2025 tentang DTSEN," katanya.

Dalam kesempatan ini Gus Ipul memastikan hal yang diungkap ini telah berdasarkan data, sehingga bansos bisa tepat sasaran dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

"Bansos itu jelas peruntukannya. Tidak boleh digunakan untuk membeli hal-hal di luar peruntukannya. Misalnya untuk asupan bayi, penyandang disabilitas, untuk lansia, asupan ibu hamil, ongkos anak sekolah. Jadi, sudah jelas peruntukannya. Tidak diberikan cuma-cuma," kata dia.

Menurutnya, saat bansos



Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

digunakan untuk kepentingan lain di luar tujuannya, maka sungguh sangat memprihatinkan. Sebab, masih banyak pihak yang membutuhkan bansos. Dia juga menjelaskan, temuan ini tidak membuat kuota bansos dikurangi.

"Untuk bansos tidak ada yang dikurangi, bahkan Presiden memberikan penebalan bansos kepada 18 juta lebih KPM," terangnya.

Penebalan bansos dilakukan khusus untuk Juni dan Juli 2025. KPM yang biasanya menerima Rp600 ribu, mendapatkan dukungan tambahan sebanyak Rp200 ribu untuk 2 bulan. "Artinya 18 juta lebih KPM menerima Rp1 juta di triwulan kedua," ujarnya.

Gus Ipul menambahkan, pencoretan bansos selanjutnya akan dialihkan kepada yang berhak di desil 1 hingga desil 4 DTSEN. Meski begitu, jika ada yang merasa keberatan soal bansos, ia mempersilakan untuk melapor dengan melampirkan data-data lengkap.

"Kami mohon kalau ada keberatan itu juga melampirkan bukti-bukti yang cukup agar kita bisa menindaklanjuti," katanya.

Ia mengatakan aduan dan data yang diterima Kemensos nantinya akan diverifikasi dan validasi. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi pihak terakhir yang memvalidasi data tersebut. "Kami akan membantu pemutakhiran lewat sumber daya yang kami miliki," kata dia.

Sebelumnya, Kemensos dan PPATK menemukan ada 571.410 rekening penerima bansos terindikasi digunakan untuk judol. Gus Ipul

Evaluasi Bansos oleh Kemensos (Terkait Judi Online)

- 603.999 KPM terindikasi main judi online
 - 228.048 sudah tak terima bansos (Triwulan 2)
 - 375.951 dievaluasi (Triwulan 3)
- Awalnya dicek 32 juta KPM, hasil awal PPATK: 656.543 terindikasi.
- Transaksi judi:
 - Tertinggi: Rp3 M
 - Terendah: Rp1.000
 - Rata-rata: Rp2 juta
- Data 2024:
 - 571.410 rekening bansos dipakai judi
 - Total transaksi: >7,5 juta
 - Nilai: Rp957 M - Rp1 T
- Kebijakan:
 - Dicoret dari bansos jika terbukti
 - Bansos dialihkan ke yang berhak (Desil 1-4 DTSEN)
 - 18 juta KPM dapat tambahan Rp200.000 (Juni-Juli 2025)



menyatakan akan menindak tegas penyalahgunaan tersebut dan mulai dengan memeriksa peran para pen-damping program keluarga harapan (PKH).

"Kalau dia ikut PKH lalu rekeningnya diketahui dipakai untuk main judol, kita akan periksa pendampingnya," kata Gus Ipul, Kamis (17/7/2025) lalu.

PPATK mencatat, sepanjang 2024, terdapat lebih dari 7,5 juta transaksi judi online dari rekening milik penerima bansos, dengan total deposit nyaris mencapai Rp 1 triliun. Data ini didapat dari pencocokan lebih dari 28 juta nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos dengan data pemain judi online. Hasilnya, sebanyak 571.410 NIK penerima bansos terekam sebagai pemain aktif judol.

"Itu benar-benar mengagetkan. Bansos itu sementara, untuk kebutuhan pokok, bukan untuk yang lain, apalagi judol," tegas Gus Ipul. (rls,ist/lut)

"Dari sejumlah 603.999 yang terindikasi terlibat judi online, ada 228.048 KPM saat ini sudah tidak menerima bansos pada triwulan ke-2, sementara yang 375.951 KPM kita sedang lakukan evaluasi untuk bansos triwulan ke-3,"

SAIFULLAH YUSUF
Menteri Sosial



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: dok/vel

Akankah PSI Besar Seperti Ramalan Jokowi ?

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah melangsungkan Kongres, di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (19/7/2025). Dalam kesempatan itu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menyampaikan prediksi atau "ramalan" bahwa PSI akan menjadi partai besar dan kuat tapi pada 2034 mendatang, akankah?

"Saya masuk (gedung) tadi, memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar," kata Jokowi menceritakan respons antusias para peserta kongres yang menyambutnya di Graha Saba Buana pada Hari Sabtu (19/7/2025) sore.

Akan tetapi, Jokowi mengingatkan bahwa PSI harus menempuh tahap-tahap yang panjang terlebih dahulu melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 sebelum akhirnya menjadi partai besar pada tahun 2034 kelak.

"Tapi, jangan tergesa-gesa. Ada step-stepnya. Belum (besar) di 2029, feeling saya akan mulai di 2034 dengan catatan semuanya, mesinnya, semuanya bekerja keras," sambungnya.

Jokowi menilai bahwasanya perubahan PSI menjadi 'Partai Super Tbk' di mana anggota-anggotanya bisa memilih ketua umum (ketum)nya sendiri akan memperkuat rasa kepemilikan para kader. Sehingga, partai tersebut bisa menjadi lebih kuat lagi dalam melayani rakyat dan bertarung di dalam kontestasi-kontestasi elektoral berikutnya.

"Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat. Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah 'Partai Super Tbk'. Artinya apa, saham partai ini

dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader," jelasnya.

"Dengan ini, mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membersarkan partai. Karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai," lanjutnya.

Jokowi yakin dengan perubahan dan kekuatan yang ada, suara PSI akan naik 3 kali lipat dalam Pemilu 2029. Sang mantan presiden yang masih populer di banyak kalangan rakyat Indonesia itu menyerukan siap bekerja sekeras-kerasnya untuk PSI ke depannya.

"Sekarang, sudah ada 181 anggota DPRD, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Itungan saya di 2029 mungkin bisa 3 kali lipat. Insyallah, asal semuanya manajemennya disiapkan mulai dari sekarang," ujarnya.

Menjelang akhir pidatonya yang berisi wejangan-wejangan bagi para peserta kongres, Jokowi berpesan agar partai yang kini berlogo gajah dengan kepala menghadap ke langit itu untuk senantiasa melayani kepentingan rakyat.

"Saya ingin orientasi seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di PSI itu adalah untuk negara, untuk rakyat, untuk bangsa. Bukan untuk kelompok dan untuk pribadi-pribadi," tegasnya.

Sementara itu, Kaesang Pangarep yang terpilih menjadi Ketua Umum DPP PSI periode 2025-2030 juga yakin PSI akan menjadi partai besar

dan diperhitungkan. Namun, berbeda dengan Jokowi yang menyatakan PSI akan besar pada 2034, Kaesang malah mengatakan bahwa PSI akan besar pada 2029.

"Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kader PSI karena saya gagal membawa partai ini masuk ke Senayan. Tapi ingat, di 2029 nanti kita akan menjadi partai yang diperhitungkan," kata Kaesang.

Kaesang mengatakan bahwa pada periode sebelumnya, ia hanya

memiliki waktu tiga bulan untuk mengkampanyekan partai yang kini berlogo gajah merah-putih tersebut.

Namun demikian, putra bungsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo itu juga mengapresiasi kinerja para kader di Pemilihan Legislatif 2024 karena terjadi peningkatan 100 persen di DPRD, baik tingkat 1 maupun tingkat 2.

Dia merasa yakin, dengan adanya waktu yang panjang karena masih sekitar 4 tahun hingga tahun politik berikutnya, Kaesang menjanjikan kepada para kader bahwa dirinya mampu membuat PSI menjadi partai yang besar dan lolos ke Senayan pada 2029.

"Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti, 2029 kita akan menjadi partai yang besar," kata Kaesang.

Untuk diketahui, pada dua pemilu yang sudah diikuti PSI, yakni Pemilu 2019 dan 2024, raihan suara partai itu masih di bawah ambang batas parlemen, 4 persen. Pada Pemilu 2019, misalnya, raihan suara PSI sebesar 2.650.361 suara atau 1,89 persen suara sah nasional. Kemudian, meski raihan suara meningkat pada Pemilu 2024 menjadi 4.260.169 suara atau 2,81 persen, tetapi tetap

saja gagal melampaui ambang batas 4 persen.

Lantas apakah PSI bisa besar seperti keyakinan Bapak dan Anak di atas? peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, melihat dukungan Jokowi sebagai mantan presiden kepada PSI bisa menjadi modal partai itu untuk mendongkrak elektabilitasnya di Pemilu 2029. Apalagi, menurut Lili, Jokowi masih populer dan tingkat kesukaannya tinggi dari publik.

"Namun, bisa tidak secara otomatis atau given. Tergantung respons publik, apakah positif atau negatif. Jika negatif, tentu akan menjadi tantangan bagi Jokowi dan PSI," ujar Lili, dilansir Kompas, Minggu (20/7/2025).

Ia juga menandakan, selain kehadiran Jokowi, PSI yang kini mengusung slogan "Partai Super Terbuka" bisa menjadi citra yang positif di mata publik. Cara itu memungkinkan menjadi salah satu daya tarik bagi pemilih.

Meski demikian, Lili menandakan bahwa tidak cukup hanya mengandalkan sosok Jokowi dan slogan barunya. Namun, PSI harus berfokus pada kaderisasi dan penguatan basis massa di akar rumput. Dengan demikian, pengurus partai harus terjun langsung ke akar rumput secara berkala, bukan hanya menjelang pemilu.

"Tampaknya Jokowi menyadari hal itu sehingga perlu mesin politik bergerak dari desa-desa dan harus ada 'bensin' alias logistik," kata Lili.

Lili melanjutkan, komitmen untuk melayani masyarakat juga harus diimplementasikan, bukan hanya janji kosong. Masyarakat butuh kader partai yang melayani dan mengayomi.

Selain itu, dengan dukungan dari Jokowi, Lili memprediksi akan ada pertarungan sengit di Jawa Tengah pada Pemilu 2029. Sebab, pemilih Jokowi dinilai kuat di wilayah Jawa Tengah.

"Tentu ini ancaman bagi PDI-P sehingga ia nanti tidak akan tinggal diam basis massanya tergerus. Dengan demikian, Pemilu 2029 akan terjadi pertarungan antara 'Banteng' dan 'Gajah'," tutur Lili.

Banteng merujuk pada PDI Perjuangan yang merupakan partai politik pertama Jokowi, sedangkan Gajah merupakan logo baru dari PSI. (rls,ant,ist/lut)

"Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat. Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah 'Partai Super Tbk'. Artinya apa, saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader,"

JOKO WIDODO
Presiden ke-7 RI

REKRUTMEN TENAGA KERJA INDONESIA DI LEVEL TERENDAH SEJAK 2022

Laporan terbaru Survei Kegiatan Dunia Usaha kuartal II-2025 yang dilansir oleh Bank Indonesia (BI) menyebut ketersediaan pekerjaan di Indonesia terjun ke level terendah sejak 2022.

Perkembangan rekrutmen tenaga kerja makin menurun di tengah aktivitas industri pengolahan yang masih berkontraksi, sepiunya proyek pembangunan juga berakhirnya musim panen di berbagai daerah.

Penurunan ketersediaan pekerjaan baru tersebut berlangsung ketika kegiatan dunia usaha di Tanah Air lebih lesu dibanding kondisi tahun lalu dan diperkirakan masih belum membaik pada periode berikutnya.

Kondisi keuangan perusahaan juga dilaporkan berada dalam kondisi likuiditas yang tak lebih baik dibanding periode sebelumnya, di kala kemampuan korporasi mencetak laba juga sedikit menurun.

Kalangan pelaku usaha juga makin banyak yang menilai aksesibilitas terhadap kredit perbankan 'lebih sulit', ketika jumlah pelaku usaha yang melakukan investasi juga menurun pada separuh pertama tahun ini.

Survei BI dilihat Minggu (20/7/2025) mendapati, pada kuartal II-2025, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) tenaga kerja mencatat kontraksi hingga 0,34%, berbalik dari kondisi kuartal I-2025 yang masih tumbuh positif 0,97%.

Penurunan rekrutmen tenaga kerja pada kuartal II tersebut menjadi yang terburuk sejak terakhir kali mencatat kontraksi pada kuartal IV-2022 dengan SBT -0,04%.

Beberapa sektor usaha yang mencatat kontraksi penggunaan tenaga kerja adalah lapangan usaha industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan negatif tenaga kerja 0,54%. Ini menjadi kontraksi terbesar dibanding lapangan usaha lain.

Disusul oleh sektor pertanian, kehutanan serta perikanan yang terkontraksi 0,38%, akibat terbatasnya aktivitas pascapanen komoditas tanaman pangan.

Lapangan usaha konstruksi dan pengadaan listrik juga tumbuh negatif perihal pemakaian tenaga kerjanya, sebesar masing-masing minus 0,29% dan 0,16%, serta sektor transportasi



Antrean mengular para pencari kerja di sebuah toko ritel di Cianjur, Jawa Barat (Ist)

dan pergudangan -0,1%. "Ini sejalan dengan masih terbatasnya kegiatan pembangunan," kata Bank Indonesia dalam laporan yang dilansir hari ini.

Di lapangan usaha industri pengolahan, beberapa subsektor yang mencatat kontraksi di antaranya industri tekstil dan pakaian jadi, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, juga industri karet, barang dari karet dan plastik juga industri furnitur.

Sedangkan yang masih bertumbuh penggunaan tenaga kerjanya adalah sektor pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, juga pendidikan.

Untuk kuartal III-2025, survei memperkirakan rekrutmen tenaga kerja akan sedikit meningkat dengan SBT kembali positif di angka 0,81%.

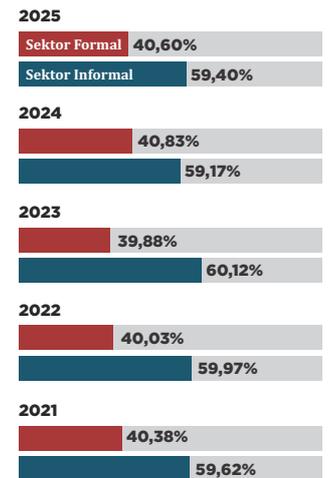
Beberapa sektor yang diprakirakan meningkat penggunaan

tenaga kerjanya antara lain lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, juga sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Serta jasa keuangan.

Namun, beberapa sektor kemungkinan masih seret lapangan kerja seperti industri pengolahan tembakau, sektor tekstil dan pakaian jadi, industri kimia dan farmasi, industri karet, logam dasar, juga pengadaan listrik serta perdagangan mobil dan motor.

Temuan survei kegiatan dunia usaha ini sejalan dengan hasil survei konsumen terakhir yang sudah lebih dulu dirilis oleh Bank Indonesia. (wid, blo, ist/ dya)

PROPORSI PEKERJA SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL DI INDONESIA (2021-2025)



Sumber: Sakernas Februari 2025

Cermin Melambatnya Ekonomi Daerah

PENGAMAT ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Acuviarta Kartabi, menilai, membludaknya pencari kerja di berbagai daerah gambaran nyata persoalan ketenagakerjaan yang kini terjadi di Indonesia.

Menurut dia, perlambatan ekonomi yang terjadi pada semester pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu telah memicu tekanan di berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan.

Angka pengangguran terbuka di Jabar mencapai 6,74 persen atau 1,81 juta penduduk hingga Februari 2025. Angka ini naik jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2024 dengan jumlah pengangguran 1,77 juta orang.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 tumbuh 4,87 persen secara tahunan, atau melambat dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,11 persen. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Jabar pada kuartal I-2025 sebesar 4,98 persen.

Angka ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,87 persen.

Kategori industri yang merupakan sektor tertinggi dalam struktur pendapatan domestik regional bruto Jabar juga turun sebesar 0,22 persen. Hal yang sama dialami kategori konstruksi yang turun 1,96 persen dan kategori akomodasi dan makanan minuman turun 4,24 persen.

"Fenomena yang terjadi di salah satu toko nCianjur menjadi sinyal keras bagi pemerintah. Kondisi ini sangat berbahaya apabila pemerintah di kabupaten dan kota tidak memacu potensi ekonomi daerah untuk membuka lapangan pekerjaan," kata Acuviarta.

Ia pun berpendapat, ketidakpastian ekonomi global telah memicu banyak perusahaan memilih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal inilah yang berdampak langsung pada meningkatnya angka pengangguran.

Misalnya, sektor jasa restoran dan hotel di Jabar. Tingkat okupansi

hingga pertengahan tahun ini hanya sekitar 40 persen. Berdasarkan data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar, 150 pekerja hotel di Bogor telah terkena PHK.

Sementara itu, ada 2.500 hingga 3.000 pekerja kontrak yang mendapatkan pengurangan jam kerja. Adapun 31.000 pekerja di 754 restoran dan hotel yang merupakan anggota PHRI Jabar terancam jika okupansi itu terus menurun.

Jabar dengan 54 juta penduduk menjadi provinsi dengan potensi sumber daya manusia yang besar. Akan tetapi, kata Acuviarta, potensi ini belum diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai. Sebaliknya, yang lahir justru kebijakan di daerah yang kontraproduktif. (wid, kcm, ist/ dya)

TRAGEDI LAUT TERJADI LAGI KM BARCELONA TERBAKAR DI PERAIRAN MINAHASA UTARA



Kapal Motor Barcelona V yang terinformasi berlayar dari Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaud menuju Pelabuhan Manado terbakar di sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu (20/7/2025). Foto: Basarnas

Satu ibu hamil meninggal dunia dalam insiden kebakaran Kapal Motor (KM) Barcelona V di perairan sekitar Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu (20/7/2025). Peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 14.00 WITA.

menunjukkan KM Barcelona terbakar di tengah laut. Dalam video itu penumpang menjelaskan jika kapal terbakar di perairan depan Pulau Talise yang ada di Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Di video pertama, terlihat para penumpang dipakaikan life jacket. Kemudian di video kedua, terlihat para penumpang sudah melompat ke dalam air untuk menyelamatkan diri.

Sementara itu, terlihat jelas api hitam membubung tinggi dari lantai paling atas kapal tersebut.

"Kami mohon bantuannya. Kapal KM Barcelona Lima A kebakaran di depan pulau Talise. Mohon bantuan yang monitor saat ini," kalimat yang terdengar di video tersebut.

Korban Selamat:

Kami Lompat ke Laut

Salah satu penumpang selamat

Kapal Motor (KM) Barcelona V rute Manado-Talaud, Sulawesi Utara, Alwina Inang, mengaku syok dan panik saat kapal tersebut terbakar di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Minggu (20/7/2025).

"Peristiwanya sangat cepat. Sekitar pukul 12.00 Wita atau 11.00 WIB, ada yang teriak kebakaran di bagian belakang kapal, kami langsung panik," kata Alwina, yang merupakan istri dari Kasat Lantas Polres Kepulauan Talaud, Christian M, dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, saat peristiwa kapal itu terbakar, sebagian besar penumpang ada yang makan siang dan ada yang tidur. Ia pun memutuskan lompat saat asap mulai menebal.

"Saya lagi makan bersama keluarga dari Kasat Reskrim Talaud, tiba-tiba kobaran asap sudah masuk di anjungan kapal. Kami langsung melompat ke laut," ujarnya.

Alwina sendiri bersama Kasat Reskrim Talaud dan istrinya serta anak dan puluhan penumpang langsung terjun ke laut untuk menghindari asap tebal dan kobaran api. Mereka mengaku bisa berenang dan bertahan sekitar 1 jam di laut sebelum bantuan dari Tim SAR tiba.

"Sekarang kami sudah ada di pulau Serei di Minahasa Utara bersama sekitar 50 orang yang selamat. Sementara ada beberapa korban langsung dijemput mobil ambulans," tandasnya.(wid,rls,ant/dya)

Kapal Motor Barcelona V berlayar dalam kondisi terbakar. Api membara selama satu jam. Dalam tragedi tersebut, seorang ibu hamil meninggal dunia. Jenazahnya berhasil dievakuasi ke daratan.

Para korban kebakaran KM Barcelona V di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dievakuasi ke Pulau Gangga II, pulau berpenghuni yang juga berada di Kecamatan Likupang Barat.

"Kami sementara menuju ke lokasi kebakaran kapal tersebut. Terinformasi kapal terbakar sekitar pukul 12.00 WITA hingga 13.00 WITA," ujar Humas Kantor SAR Manado Nuriadin Gumeleng, Manado, Minggu (20/7/2025) dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, orientasi operasi yang dilakukan saat ini adalah mencari tahu apabila ada korban yang masih berada di dalam kapal yang terbakar.

"Kami sementara menuju lokasi untuk mencari informasi detail terkait dengan kebakaran. Tunggu informasi lanjutan yah," ucap Nuriadin.

Dia menjelaskan, SAR Manado mengerahkan KN Bima Sena bersama 15 personel serta enam personel dari Pos Likupang.

Penumpang yang meninggal dilaporkan seorang wanita yang merupakan pasien rujukan.

"Info ada satu korban. Almarhumah pasien rujukan (Talaud) ke Manado. Korban sempat dievakuasi," kata Sekretaris BPBD Sulut, Jerry Harmonsina, Minggu (20/7/2025).

Jerry menuturkan, KM Barcelona terbakar dalam perjalanan dari Talaud menuju Manado. Namun pihaknya belum menerima informasi terkait penyebab kebakaran.

Ada dua video siaran langsung yang beredar di media sosial,

Minim Standar Keselamatan Transportasi Kepulauan



BELUM genap sebulan kecelakaan kapal di Selat Bali, tragedi serupa kembali terjadi di Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Beruntung 18 penumpang semuanya selamat. Terbaru, Kapal Motor (KM) Barcelona V di perairan sekitar Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu (20/7/2025)

Kecelakaan ini menyibak kembali persoalan pengelolaan angkutan laut di Indonesia yang masih nihil standar keselamatan.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengemuka-

kan, kapal penumpang perlu memenuhi sejumlah ketentuan wajib. Salah satunya ketersediaan peralatan keselamatan atau life jacket.

"Sementara kapal yang di Mentawai adalah kapal tradisional jenis long boat dengan panjang sekitar 12 meter dan mesin tempel. Biasanya teman-teman syahbandar setempat akan membuat laporan kecelakaan kapal," kata Pelaksana Tugas Ketua Subkomite Investigasi

Kecelakaan Kapal KNKT Anggiat PTP.

Anggiat menambahkan, terkadang sejumlah kapal berangkat bukan dari dermaga-dermaga resmi dengan pengawasan ketat. Sebab, banyak dermaga "tikus" yang digunakan, seperti berangkat dari desa atau perkampungan penduduk. Kawasan ini di luar jangkauan pengawasan pihak terkait.

Izin kapal juga perlu diklarifikasi terkait peruntukan penggunaannya. Dokumen ini tidak hanya untuk kapal tertentu, bahkan kapal nelayan pun wajib memiliki surat laut sesuai dengan peruntukannya.

"Harus sesuai peruntukannya. Jangan sampai izin di surat laut per-untukannya untuk menangkap ikan, ternyata dipakai untuk membawa penumpang. Sudah menyalahi (peraturan) berarti. Nah, (kapal) di Mentawai ini, perlu klarifikasi surat lautnya jenis peruntukannya untuk apa?" ujar Anggiat.

Kapal terbalik bisa terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya adalah berat muatan/penumpang, penempatan muatan, dan cuaca yang kurang mendukung. Ketiganya dapat menjadi kombinasi yang menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Alhasil, investigasi dan verifikasi di lapangan serta keterangan saksi dibutuhkan guna mengetahui penyebab kecelakaan.

Direktur The National Maritime Institute Siswanto Rusdi berpendapat, angkutan penumpang yang terbalik ini bahkan tidak bisa disebut sebagai kapal, tetapi perahu. Moda ini yang menjadi ciri khas daerah-daerah kepulauan.

"Karena budaya keselamatan kita itu rendah, otoritas atau syahbandar enggak pernah (mengawasi). Harusnya, kan, dibina, disiapkan pelampung untuk dipakai selama perjalanan. Hal ini tidak terjadi. Inilah kenyataan di seluruh pulau," ujarnya.(wid,rls,kcm/dya)

Hasilkan 700 Ton Sampah/Hari, Kota Malang Diusulkan Masuk Proyek Pengolahan Sampah Jadi Listrik



(Ilustrasi) Sanitary landfill di TPA Supit Urang Kota Malang. (Santi/Lentera)

MALANG - Dengan volume sampah mencapai 700 ton per hari, Kota Malang diusulkan masuk dalam daftar 33 daerah penerima program nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, mengatakan usul tersebut karena Kota Malang memiliki potensi jumlah sampah yang dinilai memenuhi

syarat dasar program.

"Beberapa waktu lalu saat ke Jakarta, kami menjadi salah satu dari 33 pemerintah kota dan kabupaten yang diusulkan Menteri Lingkungan Hidup untuk program PSEL. Karena kapasitas tonase harian kami sudah mendekati 1.000 ton," ujar Rahman, Minggu (20/7/2025).

Dari total timbulan 700 ton per hari yang dihasilkan Kota Malang saat ini, Rahman merinci, sekitar 550 ton langsung ditangani oleh Tempat Pemrosesan

Akhir (TPA) Supit Urang. Sedangkan sisanya, sekitar 150 hingga 200 ton dikelola oleh masyarakat melalui skema pengelolaan berbasis komunitas dan Tempat Pengolahan Sementara Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Meski begitu, menurut Rahman, Kota Malang masih perlu menambah sekitar 300 ton sampah per hari agar

memenuhi target minimal 1.000 ton yang menjadi syarat program PSEL.

Untuk itu, DLH Kota Malang berencana menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu. "Kami tidak bisa sendirian. Untuk memenuhi kapasitas yang ditetapkan, kami harus berkolaborasi dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Ini penting supaya pengelolaan sampah menjadi energi bisa dilakukan bersama," jelas Rahman.

Rahman menegaskan, kolaborasi lintas daerah ini tak hanya untuk memenuhi kebutuhan tonase, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam pengelolaan sampah di wilayah Malang Raya. Harapannya, sistem pengelolaan regional dapat memberikan manfaat lebih luas dan efektif.

Saat ini, tingkat pengelolaan sampah di Kota Malang baru mencapai 24 persen. Melalui proyek PSEL, DLH menargetkan seluruh sampah dapat terkelola habis, sehingga tidak lagi menjadi timbunan di TPA Supit Urang.

"Harapannya, pada 2026 nanti, tidak ada lagi timbunan sampah yang

menumpuk. Sampah bisa dikelola habis dan diubah menjadi energi listrik," ucapnya.

Selain mengurangi beban TPA, penerapan PSEL diyakini mampu memperpanjang usia sanitary landfill di TPA Supit Urang. Sekaligus membuka peluang penerapan teknologi energi terbarukan di Kota Malang.

"Nantinya, pengelolannya tetap di TPA Supit Urang. Kalau ini berjalan, manfaatnya besar. Selain mengurangi beban, kami juga bisa memperpanjang usia landfill," tambahnya.

Soal kapasitas listrik yang berpotensi dihasilkan dari proyek PSEL, Rahman mengaku belum dapat memastikan hal tersebut. Sebab, program ini masih berada di tahap usulan dan pencairan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

"Daya listrik yang bisa dihasilkan belum diketahui pasti. Kemarin baru sebatas pendataan dan pencairan. Tapi kami optimis, program ini bisa menjadi terobosan pengelolaan sampah di Kota Malang," pungkasnya. (Santi/Dya)

Baru 10 dari 727 Ponpes di Kabupaten Malang dapat Pembinaan Ramah Anak

MALANG - Dari total 727 pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Malang, baru sekitar 8 hingga 10 pesantren yang telah mendapat pembinaan pesantren ramah anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo mengakui, angka tersebut masih sangat jauh dari jumlah keseluruhan pesantren yang ada di wilayah itu.

"Ada yang sudah kami bina, cuma kami nggak hafal pesantren mana saja. Yang jelas, yang sudah kami lakukan pembinaan ada delapan sampai 10 pondok pesantren. Kalau sekolah lebih banyak," ujar Arbani, dikutip pada Minggu (20/7/2025).

Menurutnya, keterbatasan jumlah tenaga menjadi salah satu kendala utama dalam memperluas jangkauan pembinaan ke seluruh pesantren di Kabupaten Malang.

"Mungkin tenaga kami bisa melakukan edukasi kepada pondok pesantren agar menjadikan pondok pesantren ramah anak. Namun keterbatasan tenaga kami di DP3A

tidak bisa langsung menjangkau sekian banyak pondok pesantren di Kabupaten Malang," katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang per April 2024, terdapat 727 pondok pesantren di Kabupaten Malang. Lembaga-lembaga tersebut tersebar di seluruh 33 kecamatan, dengan kecamatan Gondanglegi menjadi wilayah yang mempunyai jumlah ponpes terbanyak, yakni 102 lembaga.

Lebih lanjut, Arbani menjelaskan, meskipun dalam kondisi terbatas, pihaknya tetap berupaya melakukan pembinaan. Salah satunya melalui kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan pesantren yang ramah anak.

"Kami sudah melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama untuk bisa mengedukasi pondok pesantren agar menjadi pondok pesantren ramah anak," jelasnya.

Menurutnya, edukasi tersebut meliputi pemahaman tentang

perlindungan anak, pencegahan kekerasan, serta pembentukan satuan tugas di lingkungan pesantren. Yang berperan sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya menciptakan pesantren ramah anak.

Arbani menyebut, selain pembinaan yang dilakukan langsung oleh DP3A, pihaknya juga mendorong agar pengasuh dan pengelola pondok pesantren berinisiatif mengajukan permohonan kepada DP3A. Dengan begitu, DP3A dapat datang langsung memberikan edukasi dan panduan terkait penerapan konsep pesantren ramah anak.

"Bisa juga para pengasuh pondok pesantren mengajukan permohonan kepada kami untuk bisa menciptakan pondok pesantren ramah anak," tutur Arbani.



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo. (dok. Ist)

Sebagai informasi, isu pembinaan pondok pesantren ramah anak di Kabupaten Malang, ini mencuat salah satunya dipicu oleh dugaan kasus penganiayaan yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Mujtaba, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, pada 5 Juni 2025 lalu. (Santi/Dya)

PEMILU JEPANG: NASIB PM ISHIBA DIPERTARUHKAN

Warga Jepang memberikan suara pada Minggu (20/7/2025) dalam pemilu majelis tinggi yang berlangsung sengit dan berpotensi memicu gejolak politik, di tengah tekanan akibat lonjakan harga dan kekhawatiran soal imigrasi yang bisa menggoyahkan posisi Perdana Menteri Shigeru Ishiba.

Jajak pendapat menunjukkan Partai Demokrat Liberal Ishiba dan mitra koalisi Komeito mungkin kekurangan 50 kursi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kendali atas 248 kursi majelis tinggi parlemen dalam pemilihan umum di mana separuh kursinya diperebutkan.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa partai-partai oposisi yang lebih kecil yang mendorong pemotongan pajak dan peningkatan belanja publik akan memperoleh keuntungan, di antaranya partai sayap kanan Sanseito, yang berjanji untuk mengekang imigrasi, menentang arus masuk modal asing, dan membalikkan gerakan kesetaraan gender.

"Saya sedang kuliah pascasarjana, tetapi tidak ada orang Jepang di sekitar saya. Semuanya orang asing," kata Yu Nagai, mahasiswa berusia 25 tahun yang mengaku memilih Sanseito.

"Ketika saya melihat cara kompensasi dan uang dibelanjakan untuk orang asing, saya merasa orang Jepang agak tidak dihormati," kata Nagai.

Pemungutan suara berakhir pada pukul 8 malam (1100 GMT), saat media diharapkan memproyeksikan hasil berdasarkan jajak pendapat keluar.

Kinerja buruk koalisi dapat mengguncang kepercayaan investor terhadap ekonomi terbesar keempat di dunia dan mengganggu pembicaraan perdagangan penting dengan Amerika Serikat, kata para analis.

Ishiba mungkin harus memilih antara memberi jalan bagi pemimpin LDP baru atau berjuang untuk mendapatkan dukungan dari

beberapa partai oposisi dengan kompromi kebijakan, kata Rintaro Nishimura, seorang rekan di Asia Group di Jepang.

"Setiap skenario mengharuskan LDP dan Komeito untuk membuat konsesi tertentu, dan akan menantang, karena setiap mitra potensial memiliki pengaruh dalam negosiasi."

Setelah pemilu, Jepang menghadapi tenggat waktu 1 Agustus untuk mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat atau menghadapi tarif yang berat di pasar ekspor terbesarnya.

Pungutan impor semacam itu dapat menekan perekonomian dan semakin menekan pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan kepada rumah tangga yang sudah terpuruk akibat inflasi, termasuk



Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP), mengangkat tinjunya dari atas bus kampanye pada hari terakhir kampanye untuk pemilihan majelis tinggi 20 Juli, di Tokyo, Jepang 19 Juli 2025. (Reuters)

kenaikan harga beras dua kali lipat sejak tahun lalu.

Dengan memperhatikan pasar obligasi pemerintah yang gelisah, LDP telah menyerukan pengendalian fiskal dan menolak seruan oposisi untuk pemotongan pajak besar-besaran dan pengeluaran kesejahteraan untuk meringankan dampaknya.

Pemerintahan Ishiba kehilangan mayoritas di majelis rendah yang lebih berkuasa pada bulan Oktober.

Itu adalah penampilan terburuk LDP dalam 15 tahun, mengguncang pasar keuangan dan membuat perdana menteri rentan terhadap

mosi tidak percaya yang dapat menggulingkan pemerintahannya dan memicu pemilihan umum baru.

"LDP telah menjalankan pemerintahan tanpa menyelesaikan apa pun," kata Kaoru Kawai, seorang novelis berusia 59 tahun yang memilih partai oposisi, Partai Demokrat Konstitusional Jepang.

Diperintah oleh LDP selama sebagian besar periode pascaperang, Jepang sejauh ini berhasil menghindari perpecahan sosial dan perpecahan politik seperti yang terlihat di negara-negara demokrasi industri lainnya. (Reuters,ist/nei)

Gejolak Politik Bisa Guncang Yen dan Obligasi

Seorang pedagang memberikan kantong plastik kepada seorang pembeli di sebuah kios makanan di kawasan perbelanjaan di Tokyo, Jepang. (Reuters)



Menjelang pemilu majelis tinggi Jepang yang dianggap paling krusial dalam beberapa tahun terakhir. Potensi kekalahan koalisi Perdana Menteri Shigeru Ishiba, para investor mulai menilai apakah tren penjualan utang negara dalam jumlah besar akan tetap berlanjut.

Obligasi pemerintah Jepang (JGB) anjlok minggu ini, menyebabkan imbal hasil utang 30 tahun ke titik tertinggi sepanjang masa, sementara yen merosot ke titik terendah dalam beberapa bulan terhadap dolar AS dan euro.

Jajak pendapat semakin memburuk bagi Partai Demokrat

Liberal yang berkuasa pimpinan Ishiba dan mitra koalisi juniornya Komeito dalam persiapan terakhir menuju pemungutan suara hari Minggu, di mana partai-partai baru yang berkampanye untuk peningkatan pengeluaran dan pemotongan pajak kemungkinan besar akan memperoleh kursi.

Pertimbangan Investor dan Analisis

Koalisi LDP mempertahankan mayoritasnya, para analis secara umum mengatakan kasus paling bullish untuk pasar JGB dan yen adalah jika pemerintah dapat mempertahankan mayoritas.

Beban utang pemerintah secara keseluruhan, meski masih yang tertinggi di dunia maju yaitu sekitar 250% dari produk domestik bruto, sedang mengalami tren penurunan.

"Sulit untuk menyimpulkan bahwa kondisi fiskal Jepang sedang memburuk secara berkelanjutan," ujar Koichi Fujishiro, ekonom di Dai-

ichi Life Research Institute. "Setelah pemilihan majelis tinggi selesai, tekanan kenaikan suku bunga yang berasal dari ekspektasi peningkatan belanja fiskal mungkin mulai mereda."

Kemenangan koalisi Ishiba kemungkinan akan melihat pemulihan bagi pasar JGB, di mana aksi jual selama delapan hari menyebabkan imbal hasil utang 30 tahun naik 35 basis poin (bps) ke rekor 3,20% pada hari Selasa.

"Jika skenario ini terjadi, beberapa short JGB terlihat rentan, karena Ishiba diperkirakan akan menolak pembicaraan tentang pemotongan pajak yang dibiayai utang," kata analis Standard Chartered dalam sebuah catatan.

Selain itu, Koalisi LDP melemah dan Ishiba mengundurkan diri. Hasil yang semakin mungkin terjadi adalah koalisi Ishiba gagal memenangkan 50 kursi yang dibutuhkan untuk mempertahankan mayoritas majelis tingginya, sehingga memaksanya mencari kemitraan tambahan.

Di antara kandidat yang paling mungkin adalah Partai Demokratik untuk Rakyat (DPP), yang telah mendesak Bank Jepang untuk mengubah arah dan kembali melonggarkan kebijakan moneter. (Reuters,ist/nei)

Susu Skim vs Rendah Lemak Mana yang Lebih Sehat ?

Menentukan jenis susu yang paling sesuai bisa terasa membingungkan karena banyaknya pilihan yang tersedia di pasaran. Sebagian orang cenderung memilih susu rendah lemak atau skim karena dianggap lebih menyehatkan, sementara lainnya lebih menyukai susu murni karena memiliki rasa yang lebih kaya. Namun, benarkah susu rendah lemak memang lebih baik untuk kesehatan dibandingkan susu murni?

Jenis Susu dan Kandungan Gizi

Menurut laman Medical News Today, susu sapi yang tersedia di pasaran umumnya dibagi menjadi tiga jenis utama berdasarkan kandungan lemaknya, yaitu susu murni (whole milk) yang mengandung sekitar 3,25 persen lemak susu, susu rendah lemak (low fat milk) yang memiliki sekitar 1 persen lemak susu, dan susu skim (fat-free milk) yang hampir tidak mengandung lemak.

Meskipun perbedaan ini mempengaruhi rasa dan tekstur susu, ketiga jenis susu tersebut mengandung sejumlah besar nutrisi yang sama, termasuk protein, kalsium, dan vitamin D. Namun kandungan kalori dan lemak akan bervariasi antara satu jenis susu dengan yang lainnya.

Manfaat Susu untuk Kesehatan

Susu adalah sumber yang sangat baik untuk banyak nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Protein yang terkandung dalam susu mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel, sementara kalsium membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi.

Selain itu, susu juga mengandung berbagai vitamin dan mineral, seperti vitamin A, D, B6, dan B12. Dengan mengonsumsi satu cangkir susu skim, misalnya, seseorang bisa memenuhi sepertiga dari kebutuhan kalsium harian yang disarankan.

Selain manfaatnya untuk tulang, protein susu

seperti casein dan whey juga diketahui memiliki peran penting dalam sintesis otot. Beberapa jenis susu juga mengandung asam lemak sehat yang dapat mendukung kesehatan jantung.

Namun minum susu bukan tanpa risiko. Salah satu hal yang sering menjadi perhatian adalah kandungan lemak jenuh dalam susu murni. Sebagian besar panduan diet menyarankan untuk memilih susu rendah lemak atau susu skim untuk menghindari asupan lemak jenuh yang berlebihan, yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung.

Meski demikian, beberapa penelitian terbaru mulai meragukan klaim tersebut. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa hubungan antara lemak jenuh dan penyakit jantung lebih kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Mana yang Paling Sehat?

Pilihannya sebenarnya tergantung pada kebutuhan dan kondisi kesehatan pribadi. Susu murni mengandung lemak yang lebih tinggi, tetapi ini juga berarti susu ini lebih kaya rasa dan mendukung penyerapan vitamin yang lebih baik. Susu rendah lemak dan skim memiliki lebih sedikit kalori dan lemak, sehingga dapat menjadi pilihan yang lebih baik bagi mereka yang mengontrol berat badan atau memiliki risiko penyakit jantung.

Setiap jenis susu memang diproduksi berbeda dan kandungan nutrisinya pun berbeda-beda. Tapi, susu

jenis apakah yang paling sehat? berikut adalah jenis susu yang paling sehat untuk dikonsumsi.

Susu Sapi

Susu sapi terdiri atas berbagai vitamin dan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, seperti vitamin D, kalsium, potasium, niacin, folat dan protein. Selain itu susu sapi juga mengandung lemak jenuh. The American Heart Association sendiri menganjurkan bagi orang dewasa untuk memilih susu tanpa lemak (non-fat milk) dibanding susu full cream. Jadi bagi Anda yang sedang berusaha menurunkan berat badan, memiliki kadar kolesterol tinggi, atau penyakit jantung, sebaiknya kurangi atau hindari konsumsi susu sapi full cream karena mengandung lemak jenuh yang tinggi.

Susu Kedelai

Kedelai adalah sumber protein nabati dan merupakan sumber lemak yang baik. Kedelai juga bebas kolesterol dan memiliki kandungan lemak jenuh lebih rendah dibandingkan susu sapi dan dapat menurunkan kadar LDL di dalam tubuh. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa produk kedelai bila dibarengi dengan diet rendah lemak jenuh dapat membantu mengurangi kadar LDL.

Mengonsumsi susu jenis ini dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Namun, konsumsi kedelai yang berlebihan tidak disarankan

pada orang yang menderita penyakit tiroid atau penyakit asam urat.

Susu Almond

Susu almond terbuat dari olahan kacang almond dan mengandung kalori yang lebih rendah dari susu sapi. Susu almond mengandung tekstur yang ringan, sedikit manis, dan beraroma kacang. Susu almond juga bebas kolesterol, lemak jenuh, dan bebas laktosa sehingga dapat menjadi alternatif bagi Anda yang mengalami intoleransi laktosa.

Selain itu, susu almond juga merupakan sumber vitamin A dan vitamin D yang baik bagi tubuh. Namun sayangnya, susu almond bukan sumber protein dan kalsium yang baik (kecuali sudah difortifikasi) yang penting bagi penderita osteoporosis dan anak-anak.

Susu Beras

Susu beras atau lebih dikenal dengan rice milk terbuat dari olahan beras dan air. Susu beras juga dapat menjadi alternatif pengganti susu sapi bagi orang yang menderita intoleransi laktosa.

Apabila dibandingkan dengan susu almond dan susu kedelai, susu beras merupakan produk susu yang lebih sedikit risikonya untuk memicu reaksi alergi. Jadi selain pada penderita intoleransi laktosa, susu beras juga bisa dikonsumsi oleh orang yang alergi pada kacang-kacangan (tidak bisa minum susu almond atau susu kedelai). (nei,ist/dya)



OpenAI Luncurkan ChatGPT Agent Serba Otomatis

OpenAI akhirnya merilis ChatGPT Agent miliknya. Sesuai dengan yang telah diperkirakan, agen AI ini mampu menjalankan berbagai tugas di komputer secara otomatis hanya lewat instruksi sederhana.

Penjelasan sederhananya, kita bisa menyuruh ChatGPT Agent untuk misalnya mengecek email, summarize hasil meeting, membuat coding-an dan sebagainya secara mandiri sesuai arahan.

ChatGPT Agent didukung oleh model kecerdasan buatan baru yang dikembangkan OpenAI khusus untuk produk tersebut. Tools ini juga bisa dipakai buat merencanakan dan membeli bahan-bahan makanan sampai bikin slide deck berdasarkan analisisnya terhadap perusahaan pesaing.

Model AI di balik ChatGPT Agent dilatih mengerjakan tugas-tugas kompleks yang melibatkan banyak tools seperti browser teks, visual sampai terminal tempat user mengimpor data mereka sendiri. Ini adalah teknik yang sama yang digunakan untuk semua model penalaran OpenAI.

Perusahaan menggabungkan tim Operator dan Deep Research menjadi satu tim terpadu dalam mengembangkan Agen ChatGPT. Product Lead Yash Kumar dan Research Lead OpenAI Isa Fulford mengatakan bahwa tim baru ini terdiri dari 20 hingga 35 orang yang bekerja di bidang produk dan riset.

Mereka mendemonstrasikan berbagai use case potensial untuk ChatGPT Agent, seperti memintanya untuk merencanakan kencana malam

dengan menghubungkannya ke Google Calendar untuk melihat kapan pengguna memiliki waktu luang, lalu melakukan referensi silang dengan OpenTable untuk menemukan lowongan di jenis restoran tertentu.

Agen ChatGPT bisa disuruh belanja online. Ini karena kombinasi teknologi di balik Deep Research dan Operator bekerja lebih baik dan lebih menyeluruh ketimbang mencoba prosesnya hanya menggunakan Operator. Kumar mengatakan ia mulai menggunakan ChatGPT Agent untuk mengotomatisasi bagian-bagian kecil dalam hidupnya, seperti mencarikan tempat parkir kantor baru di OpenAI setiap Kamis.

OpenAI masih punya PR untuk mempersingkat latensi tool baru ini. OpenAI beralasan pada dasarnya proses kerja ChatGPT Agent memang tidak didesain untuk dipantau langsung seperti Asisten AI ChatGPT yang bisa ditanya dan menjawab dengan cepat.

S e b e l u m

mengerjakan tugas, misalnya mengirim email, ChatGPT Agent tentu akan meminta izin kepada pengguna terlebih dulu. Lalu, bagaimana dengan transaksi keuangan? Dilansir The Verge, OpenAI masih membatasi kemampuan ChatGPT Agent melakukan transaksi keuangan.

Pengguna ChatGPT gratisan

tampaknya harus gigit jari dan harus upgrade ke layanan berbayar untuk mencoba tool baru ini. OpenAI akan mulai meluncurkan alat ini untuk pengguna Pro, Plus, dan Team. Dalam waktu dekat juga OpenAI akan merilis tool baru ini ke pengguna ChatGPT Enterprise dan Education. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



Salah Teknik Makeup Bikin Wajah Terlihat Tua

Bagi banyak perempuan, makeup adalah senjata utama untuk menambah rasa percaya diri, terutama saat akan bepergian. Namun, jika teknik pengaplikasiannya kurang tepat, hasilnya bisa berbalik arah dan malah membuat wajah tampak lebih tua.

Untuk itu, penting mengetahui kesalahan-kesalahan umum dalam bermakeup agar hasil akhir tetap terlihat segar, alami, dan sesuai usia. Berikut adalah kesalahan makeup yang sebaiknya dihindari agar tampilan kamu tetap fresh dan awet muda.

Banyak Menggunakan Concealer

Concealer memang jadi andalan untuk menyamarkan noda dan lingkaran hitam di wajah. Namun, jika digunakan terlalu banyak atau warnanya tidak sesuai, justru bisa membuat wajah terlihat lebih tua. Dilansir dari Bright Side, penggunaan concealer dengan lapisan terlalu tebal akan menonjolkan garis halus dan kerutan, sehingga membuat kulit tampak kering dan menua.

Maskara Tebal Pada Bulu Mata Bawah

Maskara memang bisa mempercantik mata dan memberikan kesan lebih hidup. Namun, mengaplikasikan maskara terlalu tebal pada bulu mata bawah justru bisa membuat area mata terlihat lebih

gelap serta menonjolkan garis-garis halus yang mungkin ingin disamarkan.

Agar tampilan mata tetap segar dan awet muda, sebaiknya aplikasikan maskara secara tipis di bulu mata bawah atau cukup fokuskan pada bulu mata atas saja. Cara ini membantu menciptakan kesan mata yang lebih terbuka dan natural tanpa memberikan efek berat pada area bawah mata.

Salah Memilih Lipstik

Lipstik adalah item wajib yang hampir selalu ada di tas makeup setiap wanita. Namun, pemilihannya perlu disesuaikan dengan warna kulit dan bentuk bibir agar tidak memberikan kesan menua. Warna yang tidak tepat justru bisa membuat wajah terlihat lebih kusam atau tidak proporsional.

Warna lipstik yang terlalu gelap, misalnya, bisa membuat bibir terlihat lebih kecil, terutama jika diaplikasikan terlalu tebal. Sebaliknya, memilih warna cerah atau netral dapat memberikan kesan segar, ceria, dan tampilan yang lebih muda serta alami.

Eyeshadow Gelap Secara Tidak Merata

Eyeshadow gelap memang dapat memberikan kesan dramatis dan tajam pada riasan mata. Namun, jika diaplikasikan secara tidak merata atau terlalu dominan di seluruh kelopak

mata, justru bisa membuat wajah terlihat lelah dan menambah kesan lebih tua dari usia sebenarnya.

Untuk hasil yang lebih segar dan seimbang, Anda bisa mengaplikasikan eyeshadow gelap di sudut luar mata saja. Pastikan untuk membaurkannya dengan rapi agar transisi warnanya halus dan menciptakan tampilan mata yang lebih lembut, elegan, serta tetap terlihat muda.

Memmingkai Alis Berlebihan

Alis adalah elemen penting dalam makeup yang berperan besar dalam membingkai wajah dan mempertegas ekspresi. Tampilan alis yang rapi dan sesuai bentuk wajah dapat memberikan kesan segar dan proporsional. Namun, perlu diingat bahwa membingkai alis secara berlebihan justru bisa berdampak sebaliknya.

Dikutip dari Reader's Digest, penggunaan warna alis yang terlalu gelap atau bentuk yang terlalu tegas dapat menghilangkan kesan alami pada wajah. Hal ini bisa membuat tampilan terlihat kaku dan bahkan menambah kesan lebih tua.

Warna Kontur yang Terlalu Gelap

Kontur memiliki fungsi penting dalam makeup untuk membentuk dimensi wajah dan menciptakan ilusi wajah yang lebih tirus. Teknik ini

sangat efektif jika dilakukan dengan tepat, karena dapat menonjolkan struktur wajah secara natural dan memperindah keseluruhan tampilan.

Namun, memilih warna kontur yang terlalu gelap justru bisa membuat riasan terlihat berat, tidak natural, dan menimbulkan kesan wajah yang kusam serta lebih tua. Agar hasilnya tetap halus dan menyatu dengan kulit, gunakan warna kontur yang hanya satu hingga dua tingkat lebih gelap dari warna kulitmu. Pastikan untuk membaurkannya dengan merata agar transisinya terlihat lembut dan tidak mencolok.

Salah Teknik Gunakan Blush On

Blush on adalah salah satu produk makeup yang bisa menjadi pemanis wajah sekaligus memberikan efek segar dan sehat. Namun, penggunaannya harus tepat agar hasilnya tidak berlebihan. Jika diaplikasikan terlalu tebal atau terlalu rendah di area pipi, wajah justru bisa terlihat berat dan memberi kesan lebih tua.

Untuk tampilan yang lebih muda dan alami, aplikasikan blush on secara ringan di atas tulang pipi lalu tarik ke arah pelipis. Pilih warna-warna natural seperti coral, peach, atau pink lembut yang sesuai dengan warna kulit. Teknik ini akan membuat wajah tampak lebih merona. (nei,ist/dya)

Kasus Kuota Haji, (dari Hal 1) ...

KPK akhirnya mengeluarkan isyarat bahwa penanganan kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji khusus yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan akan segera meningkat ke tahapan penyidikan. Atas isyarat ini, maka siapa yang akan menyanggah status tersangka dalam kasus yang terjadi pada era menteri agama (menag) Yaqut Cholil Qoumas ini akan segera terkuak.

"Dalam waktu dekat mudah-mudahan kami sudah bisa melangkah ke tahap yang lebih pasti," ujar Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Minggu (20/7/2025).

Di satu sisi, dalam Upaya ini, KPK meminta masyarakat untuk mendukung proses yang sedang dilakukan. Nah, dalam penanganan kasus ini, KPK sudah beberapa kali melakukan pemanggilan dan memintai keterangan saksi saksi. Sebagian penyidik pun sudah melakukan pemeriksaan korban.

Asep mengatakan, penyidik KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan atau informasi mengenai kuota haji khusus. "Beberapa telah kami minta keterangan terkait masalah haji. Ya, mohon di-support," ujar Asep.

Pada 20 Juni 2025, KPK mengonfirmasikan telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus. Sejumlah pihak tersebut, seperti Ustadz Khalid Basalamah hingga Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap Ust Khalid Basalamah telah dilakukan pada Senin (23/6/2025) lalu. Pemeriksaan dilakukan karena saksi memiliki biro perjalanan haji dan umrah. "Semuanya masih didalam," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada Antara dari Jakarta saat itu.

KPK mengungkapkan bahwa keterangan dari Khalid Basalamah membantu penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus. "Setiap informasi dan keterangan yang disampaikan tentu sangat dibutuhkan oleh tim KPK untuk mengurai konstruksi perkara ini," ujar Budi Prasetyo.

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa Khalid Basalamah saat dimintai keterangan bersikap kooperatif, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh tim KPK. "Dengan demikian, tentu sangat membantu dalam proses penanganan perkara terkait dengan kuota haji ini," katanya.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa KPK membuka peluang untuk memanggil kembali Khalid Basalamah. "KPK terbuka peluang untuk mengundang ataupun

memanggil pihak-pihak lain untuk dimintai keterangannya terkait dengan perkara ini," katanya.

Selain memeriksa Ust Kholid Basalamah, ia juga mengatakan KPK sedang mengidentifikasi jumlah agen umrah dan haji yang terlibat dalam kuota haji khusus pada tahun 2024 atau sebelumnya, terutama dengan memeriksa Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur.

"Pihak-pihak yang tadi disebutkan semuanya didalam terkait pengetahuannya, sehingga melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh tim untuk melihat konstruksi utuh dari perkara ini seperti apa, dan pihak-pihak mana saja yang kemudian diduga terkait," katanya.

Dia mengatakan, bahwa KPK membuka peluang untuk memanggil semua pihak dalam penyelidikan kasus tersebut, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Nanti kami lihat kebutuhan dari penyidik tentunya. Pihak-pihak mana saja yang akan didalam, tentu KPK juga tidak menutup kemungkinan untuk memanggil siapa pun yang memang dibutuhkan keterangannya untuk membuat terang perkara ini," ujarnya.

KPK juga memanggil dan memeriksa Hery Indratno, Kepala Divisi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), Rabu (25/6/2025) lalu. Pemeriksaan ini semakin menguatkan sinyal bahwa KPK serius membongkar praktik lancung yang merugikan calon jemaah haji.

Hery Indratno diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mendalami alur dan pengelolaan kuota haji, khususnya terkait penambahan kuota yang menjadi sumber masalah. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut "Benar," ujar Budi Prasetyo sebagaimana dilansir Antara, Rabu hari ini.

Usai pemeriksaan di gedung KPK, Hery Indratno pergi meninggalkan gedung tersebut pada pukul 15.19 WIB. Ia tidak mengucapkan satu kata pun kepada wartawan ketika bertanya kepadanya.

Keseriusan KPK dalam mengusut kasus ini memunculkan pertanyaan besar di publik: sejauh mana keterlibatan para petinggi di Kementerian Agama, termasuk bekas Menteri Agama saat itu yakni Yaqut Cholil Qoumas?

Sebagai penanggung jawab tertinggi di kementerian, kebijakan dan pengawasan terkait kuota haji berada di bawah wewenangnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendorong KPK untuk tidak ragu memanggil dan memeriksa Menag Yaqut.

"KPK harus berani memanggil Menteri Agama. Sebab, kebijakan dan

keputusan akhir terkait pembagian kuota tambahan itu ada di tangan menteri. Tidak mungkin bawahan bergerak sendiri tanpa sepengetahuan atau bahkan perintah atasan," ujar Boyamin baru-baru ini.

Menurut Boyamin, pemanggilan Menag Yaqut Cholil Qoumas sangat penting untuk membuat terang perkara ini.

"Pemeriksaan terhadap menteri akan menjadi kunci untuk membongkar konstruksi kasus ini secara utuh. Siapa saja yang memerintahkan, siapa yang diuntungkan, dan ke mana saja aliran dananya," tambahnya.

KPK sendiri telah menyatakan akan memanggil siapa pun yang dianggap mengetahui, melihat, atau mendengar rangkaian peristiwa dalam kasus ini.

Publik kini menanti langkah selanjutnya dari KPK, apakah pemeriksaan terhadap Hery Indratno akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap peran aktor-aktor yang lebih besar dalam skandal korupsi kuota haji ini.

Untuk diketahui, penyelidikan KPK pada kasus ini berawal dari adanya dugaan penyelewengan kuota tambahan haji sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan oleh Arab Saudi kepada Indonesia. Kuota ini diduga tidak didistribusikan secara transparan dan akuntabel.

Di mana sebagian kuota diduga dialihkan dari haji reguler menjadi haji khusus (ONH Plus) atau haji furoda (undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi) yang dikelola oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Praktik ini diduga melibatkan "jual-beli" kuota dengan harga fantastis, yang tentunya melibatkan oknum-oknum di internal Kemenag.

Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyo mengatakan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Kebijakan itu yang membuat anggota DPR periode 2019-2024 meluncurkan Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji pada Juli 2024. Pansus Haji DPR meyakini Kemenag melanggar ketentuan pembagian kuota jemaah haji 2024.

Tadinya Kemenag dan DPR sepakat kuota dibagi 221.720 untuk jemaah reguler dan 19.280 untuk jemaah haji khusus, sehingga keseluruhan menjadi

241 ribu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024. Jumlah ini termasuk kuota tambahan 20 ribu.

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI terkait kasus ini juga melaporkan sembilan temuan penyelidikan penyelenggaraan Haji 2024. Temuan ini dipaparkan dalam paripurna terakhir DPR periode 2019-2024.

Temuan tersebut yang pertama adalah terkait kelembagaan. Nusron Wahid yang menjadi Ketua Pansus Haji pada saat itu mengatakan bahwa Kementerian Agama masih berperan ganda dalam penyelenggaraan ibadah haji, sebagai regulator maupun operator. Padahal, kata Nusron, Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan government to government dalam penyelenggaraan haji. Namun, sudah berubah menjadi government to business. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada pihak sarikah dengan menggunakan kerangka bisnis.

Kedua, terkait dengan kebijakan. Pansus Haji menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 ayat 2 UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Khususnya, tentang alokasi kuota yang ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8 persen dari kuota haji reguler.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan ketidakpatuhan dengan mengajukan pencairan nilai manfaat tanggal 10 Januari 2024 sebelum diterbitkannya KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 130 Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024 yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota..

Kemudian yang ketiga adalah terkait soal distribusi kuota haji. Nusron mengatakan, pengisian kuota haji reguler untuk jemaah yang membutuhkan pendamping penggabungan dan pelimpahan porsi masih ada celah atau kelemahan. Pendamping diisi jemaah haji reguler yang bukan mahramnya.

Kemenag juga dinilai masih belum mengupayakan maksimal menyelesaikan masalah 5.678 nomor porsi kuota 'batu', yaitu porsi haji reguler yang belum diketahui secara pasti di mana jemaah haji berada atau bertempat tinggal hingga 2024.

Nusron juga menyatakan ada ketidaksinkronan regulasi. Khususnya, antara keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 118 tahun 2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Khusus Haji 1445 H dengan SE Dirjen Bina Haji Khusus tentang Penyampaian Daftar Haji Khusus, dan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.(ist/lut)



Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, setelah persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Bui meski Tak Nikmati Hasil Korupsi

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, tidak menikmati hasil korupsi, namun demikian Hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara.

Hakim menyatakan ada sejumlah alasan dalam menjatuhkan divonis 4,5 tahun penjara tersebut. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025), hakim menguraikan unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor yang didakwakan terhadap Tom. Di mana, hakim mengatakan Tom memahami penerbitan izin impor untuk delapan perusahaan gula rafinasi swasta melanggar aturan, akan tetapi, izin impor itu tetap diberikan.

"Menimbang bahwa setelah pemberian persetujuan impor kepada delapan pabrik gula swasta, Karyoto Supri selaku Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melaporkannya kepada Terdakwa dengan nota dinas," kata hakim.

Hakim menyebut Tom memahami penerbitan izin impor itu melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 117 tentang Ketentuan Impor Gula. Hakim menyatakan penerbitan izin impor tersebut dilakukan tanpa rekomendasi dari Direktur Industri Agro Kementerian Perindustrian.

"Didasarkan fakta hukum di atas, diyakini bahwa Terdakwa sangat menyadari dan memahami penerbitan persetujuan impor kepada delapan pabrik gula swasta di atas melanggar ketentuan Permendag Nomor 117 tentang Ketentuan Impor Gula, terkait tidak adanya rekomendasi dari

Direktur Industri Agro Kementerian Perindustrian atau tidak adanya kesepakatan rapat koordinasi dengan instansi terkait yang menyepakati pelaksanaan penugasan oleh PT PPI (PT Perusahaan Perdagangan Indonesia) bekerja sama dengan delapan pabrik gula swasta yang mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih," ujar hakim.

Dalam persidangan tersebut, hakim mengatakan impor gula kristal mentah (GKM) merupakan hasil ketidackermatan Tom Lembong. Hakim menyatakan impor gula kristal mentah, yang harus diolah lagi sebelum bisa dikonsumsi, tidak tepat secara sertamerta untuk dilaksanakan saat stok gula tidak mencukupi.

Meski demikian, hakim menyatakan bahwa Tom Lembong menyalahgunakan kerugian negara. Karenanya hakim tidak membebaskan pembayaran uang pengganti kepada Tom. Alasannya, Tom Lembong tidak menikmati hasil korupsi. "Majelis hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa tidak dikenakan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b yaitu pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti," ujar hakim.

Dalam kasus ini, hakim menyatakan ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 194 miliar. Kerugian terjadi karena uang itu seharusnya menjadi keuntungan PT

Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) sebagai BUMN.

"Didasari atas perbuatan secara melawan hukum telah pula mengakibatkan kerugian keuangan negara PT PPI Persero karena uang sejumlah Rp 194.718.181.818,19 (Rp 194 miliar) harusnya adalah bagian keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT PPI Persero," kata hakim.

Meski demikian, hakim menyatakan perhitungan kerugian negara berdasarkan kekurangan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) belum dapat dihitung secara pasti dan nyata. Hakim menyatakan tidak sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara dari PDRI sebesar Rp 320,6 miliar.

"Majelis hakim berkesimpulan bahwa perhitungan atas kekurangan bea masuk dan PDRI terhadap Gula Kristal Putih belum dapat dihitung secara pasti dan nyata, perhitungan selisih pembayaran bea masuk dan PDRI gula kristal putih dengan gula kristal mentah sejumlah Rp 320.690.559.152 merupakan perhitungan yang belum nyata dan pasti benar-benar terjadi dan dapat dihitung secara jelas dan terukur atau diukur secara pasti,"

ujar hakim. Sedangkan, keputusan vonis hakim tersebut atas dasar beberapa hal yang memberatkan. Pertama, hakim menyebut Tom terkesan mengedepankan sistem ekonomi kapitalis. Di mana, ketika terdakwa memegang kekuasaan pemerintahan di bidang perdagangan, kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula nasional terkesan lebih mengedepankan

ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan kesetaraan umum dan keadilan sosial.

Kedua, hakim menilai Tom tidak melaksanakan tugas berdasarkan asas kepastian hukum. Hakim juga menyebut Tom tidak melaksanakan tanggung jawab secara akuntabel, bermanfaat, dan adil dalam pengendalian dan stabilitas harga gula yang terjangkau.

"Mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir atas gula kristal putih untuk mendapat gula kristal putih dengan harga yang stabil dan terjangkau. Harga gula kristal putih dalam tahun 2016 tetap tinggi. Januari 2016 adalah seharga Rp 13.149 per kilogram dan Desember 2019 adalah seharga Rp 14.213 per kilogram," ujar hakim.

Sedangkan, hal yang meringankan adalah Tom belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan. Hakim juga menyebut Tom tidak mempersulit proses persidangan. "Tidak mempersulit dalam persidangan," ujar hakim.

Berdasarkan berbagai pertimbangan itu, hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Tom Lembong. Hakim menyatakan Tom Lembong bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim menyatakan tidak ada hal pemaaf ataupun pembenar dalam perbuatan Tom selaku terdakwa.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana," ujar ketua majelis hakim Dennie Arsan Fatrika saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (18/7/2025).

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan," ujar hakim.

Tom dibebankan membayar denda Rp 750 juta. Jika tak dibayar, diganti 6 bulan kurungan. Namun, hakim tak membebaskan uang pengganti karena Tom tak menikmati hasil dari korupsi. (ist/lut)



"Pertimbangan hukum dari hakim yang seolah-olah menyiratkan adalah 'elemen kelalaian' dari Tom Lembong merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan seharusnya dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi,"

ALBERT ARIES

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti,